

Strategi Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara Dalam Pengelolaan Hutan Lindung Gunung Lolombulan di Kabupaten Minahasa Selatan

Ronaldo Octavianus Assa

Abstrak: Hutan selain memiliki fungsi ekologi juga merupakan bagian dari proses pemenuhan kebutuhan masyarakat. Sehingga dalam pengelolaannya memerlukan keseriusan dari pemerintah maupun masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan desain kualitatif. Data dikumpulkan dengan cara melakukan wawancara, observasi dan telaah data sekunder yang relevan. Temuan penelitian bahwa Dinas Kehutanan Sulawesi Utara memiliki kekuatan yaitu legalitas unit kerja dan sumber daya manusia (pegawai) serta sarana dan prasarana. Akan tetapi diperhadapkan dengan kendala belum tersedia sumber pembiayaan yang jelas, belum tegas kewenangan antara pihak dengan lembaga instansi lain, pengelola masih pelaksana teknis. Strategi pengelolaannya yaitu inventarisasi berkala wilayah kelola serta penataan hutannya, pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu, pemberdayaan masyarakat, pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu, penyediaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan dana, peningkatan sarana dan prasarana, pembinaan dan pemantauan dan pengembangan investasi.

Kata Kunci: Strategi, Pengelolaan, Hutan Lindung.

PENDAHULUAN

Hutan sebagai suatu ekosistem tidak hanya menyimpan sumber daya alam (SDA) berupa kayu tetapi masih banyak potensi yang dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat melalui budidaya tanaman pertanian pada lahan hutan. Sebagai fungsi ekosistem hutan sangat berperan dalam berbagai hal seperti penyedia sumber daya air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan peran penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting, hal ini dikarenakan hutan adalah tempat bertumbuhnya berjuta tanaman (Permata W.D, 2017)

Hutan memberikan peranan yang sangat penting bagi kehidupan umat manusia. Manfaat yang diperoleh dari keberadaan hutan, tidak hanya manfaat langsung seperti hasil hutan kayu dan hasil non kayu, namun juga manfaat yang diperoleh secara tidak

langsung seperti fungsi hutan sebagai perlindungan system penyangga kehidupan untuk mengatur tata air. Berkaitan dengan manfaatnya yang sangat besar bagi kelangsungan hidup manusia maupun makhluk hidup lainnya, Hutan mempunyai peranan dan kedudukan yang strategis dalam kerangka pembangunan nasional.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa hutan dindonesia sangatlah luas, dimana kekayaan alam dan keanekaragaman hayatinya berperan penting sebagai system penyangga kehidupan, penggerak perekonomian nasional dan menjadi salah satu sumber kesejahteraan masyarakat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Hutan Indonesia merupakan salah satu hutan tropis terluas di dunia sehingga keberadaanya menjadi tumpuan keberlangsungan kehidupan bangsa-bangsa di dunia, khususnya dalam mengurangi dampak

perubahan iklim global. Oleh karena itu, pemanfaatan dan penggunaannya harus dilakukan secara terencana, rasional, optimal, dan bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan daya dukung serta memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup guna mendukung pengelolaan hutan dan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan bagi kemakmuran rakyat.

Gunung Lolombulan memiliki ketinggian 1.402 meter dari atas permukaan laut dan gunung lolombulan adalah salah satu gunung yang ada di daerah Minahasa Selatan dengan fungsi utama adalah sumber utama air untuk air minum dan pertanian di sebagian besar wilayah Minahasa Selatan. Kondisi hutan yang ada di sekitar gunung lolombulan mulai terindikasi mulai terancam karena berbagai kegiatan masyarakat yang mengganggu ekosistem hutan seperti penebangan, perkebunan, dan aktifitas lain yang sering dilakukan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab, sehingga terdapat beberapa titik hutan yang telah rusak akibat aksi dari oknum yang tidak bertanggung jawab yang melakukan pembalakan liar (Palapa, 2018).

Untuk mengatasi permasalahan pengelolaan hutan tersebut tentunya diperlukan strategi pemerintah yang tepat untuk menjaga kelestarian hutan. Strategi menurut Ali Murtopo dalam Hartanto (2006), pada dasarnya adalah hal-hal yang berkenaan dengan cara-cara dan usaha seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan, dimana dalam menyusun strategi, kita tidak saja berpegang pada satu kemungkinan saja tetapi juga memperhitungkan dan mempertimbangkan semua kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Menurut Nawawi (2008:28), konsep strategi pemerintah merupakan cara terbaik dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan kebijakan, target sasaran dan program kerja

yang dimiliki oleh pemerintah untuk mewujudkan tujuan organisasi. Mengingat pentingnya strategi pemerintah untuk menjaga kelestarian hutan, peneliti melakukan observasi di daerah hutan gunung lolombulan, dan terdapat masalah dalam hutan lindung yang ada di gunung lolombulan seperti penebangan hutan secara liar, dijadikan lahan pertanian dan perkebunan, atau ahli fungsi lahan.

Aksi pembalakan liar dikawasan hutan lolombulan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab kian marak terjadi. Sejumlah warga yang tinggal disekitar lereng gunung lolombulan menuturkan maraknya aksi pembalakan liar yang diduga terjadi setiap hari, dikarenakan pada kawasan hutan lindung banyak ditemui tumpukan sisa kayu yang baru saja di potong. Hal ini lah yang dapat menyebabkan bencana alam. Salah satu contoh dampak dari pembalakan liar adalah berkurangnya debit air sungai yang berada di lereng kaki gunung lolombulan salah satunya sungai yang berada di desa Raanan Baru Kecamatan Motoling Barat sungai yang dahulunya mempunyai aliran air yang deras sekarang sudah tidak lagi dikarenakan debit air yang sudah sangat jauh berkurang. Karena itu masyarakat berharap pemerintah dan pihak terkait dalam hal ini Dinas Kehutanan akan serius melakukan pengawasan di gunung lolombulan agar tidak terjadi lagi aksi pembalakan liar sehingga kelestarian hutan di gunung lolombulan tetap terjaga.

Pengelolaan hutan merupakan kegiatan kehutanan yang mencakup kegiatan merencanakan, menggunakan, memanfaatkan, melindungi, merehabilitasi serta mengembalikan ekosistem hutan yang didasarkan pada fungsi dan status suatu kawasan hutan. Dalam menjalankan program-program tersebut dinas kehutanan tidak bisa bergerak sendiri tanpa adanya bantuan masyarakat setempat karena luasnya hutan yang ada di gunung lolombulan yang

mempunyai beberapa titik kerusakan hutan yang berbeda. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui strategi apa yang perlu dilakukan oleh Dinas Kehutan Provinsi Sulawesi Utara dalam pengelolaan hutan yang berada di gunung lolombulan.

TINJAUAN PUSTAKA

Muhamad Ikhsan Taufik (2018) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa i program pengelolaan hutan mangrove perlu dilakukan evaluasi. Sebab diperlukan adanya implementasi program yang memerlukan keterlibatan masyarakat. Rino Adwat (2014) menjelaskan bahwa menjaga kelestarian habitat dan ekosistem hutan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat disekitarnya. Wahyu Dicka Permata (2017) Penelitian ini berjudul Strategi Dinas Kehutanan Perkebunan Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Mengkomunikasikan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Mangrove, Hutan yang rusak dapat menyebabkan bencana seperti banjir dan tanah longsor. Hal ini juga yang terjadi di salah satu wilayah Indonesia yaitu Kabupaten Kepulauan Meranti ini juga mengalami kerusakan akibat bencana alam dan juga ulah manusia itu sendiri, kerusakan hutan terparah yang terjadi di Kabupaten Meranti yaitu hutan mangrove, yang mana rusaknya hutan mangrove ini dapat berdampak terjadinya abrasi pantai. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Kepulauan Meranti dalam menjalankan strategi komunikasi dalam pelaksanaan program rehabilitasi hutan dan lahan mangrove. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Teknik pengumpulan data yang dikelompokkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah 6 orang yang diambil berdasarkan teknik purposive sampling, yaitu 5 pegawai dinas dan 1 orang masyarakat. Model analisis

data interaktif peneliti gunakan untuk menjabarkan hasil penelitian dalam teknik analisa data dan untuk pemeriksaan keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi. Hasil menjelaskan bahwa diperlukannya strategi untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat terkait program rehabilitasi hutan dan lahan mangrove. Intan Silvia Dale (2012) pentingnya arti hutan dalam segi ekonomi dan ekologis masyarakat. Sehingga sebagaimana dijelaskan Tommy M. Palalpa (2018). Bahwa sangat diperlukan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan.

Secara terminology, strategi dapat diartikan sebagai ilmu tentang teknik atau taktik, cara atau kiat muslihat untuk mencapai sesuatu yang diinginkan (Tim Prima Pena, 2006:448). Secara Etimologi strategi berasal dari bahasa Yunani "*strategia*", yang berarti kepemimpinan atas pasukan atau seni dalam memimpin pasukan. Kata *strategia* bersumber dari kata *strategos* yang berkembang dari kata *stratos* (tentara) dan kata *agein* (memimpin). Istilah strategi dipakai dalam konteks militer sejak zaman kejayaan Yunani-Romawi sampai awal industrialisasi (Schonder dalam Arifin, 2011:235). Kemudian istilah strategi itu meluas ke berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang komunikasi, politik dan komunikasi politik. Hal tersebut penting dalam upaya memenangkan kompetisi dalam pemilihan umum, dan dalam pengambilan keputusan lainnya.

Strategi adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan secara berbeda atau lebih baik dari competitor untuk memberi nilai tambah pada pelanggan hingga mampu mencapai sasaran jangka menengah atau panjang organisasi (Louis et al 2011:61) menurut Chandler Kuncoro (2006:1) strategi adalah penentuan tujuan dan sasaran jangka panjang organisasi, diterapkannya aksi dan alokasi sumberdaya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Salusu (2006:

101), menjelaskan sebagai suatu seni yang menggunakan suatu kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai sasarannya melalui hubungan yang efektif dengan lingkungannya dalam kondisi yang saling menguntungkan.

Strategi tidak dapat dipisahkan dari struktur, tingka laku dan kebudayaan ditempat terjadinya proses tersebut. Namun demikian, proses ada memiliki dua aspek penting yang saling berhubungan satu sama lain. Aspek tersebut diperlukan untuk tujuan analisis. Aspek yang dimaksud adalah perumusan (*formulation*) dan pelaksanaan (*implementation*) (Andrew, 2005: 25). David (2005) mengemukakan bahwa dalam perencanaan strategi terdapat tiga tahap penting yang harus ada dilakukan di dalam suatu organisasi yaitu (1) perumusan strategi (2) Implementasi strategi (3) evaluasi strategi.

Salah satu alat yang dapat digunakan dalam perencanaan strategi yaitu analisis SWOT. Analisis ini menempatkan situasi dan kondisi sebagai faktor masukan, kemudian dikelompokkan menurut kontribusinya masing-masing. Analisa ini secara logis dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan sehingga dapat digunakan sebagai alat efektif untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan, sebagai proses pengambilan keputusan untuk menentukan strategi. Analisis SWOT terdiri atas empat komponen dasar, yaitu: 1) Strengths (S) adalah situasi atau kondisi kekuatan organisasi atau program pada saat ini, 2) weaknesses (W) adalah situasi atau kondisi kelemahan dari organisasi atau program pada saat ini, 3) opportunities (O)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis strategis terhadap pengelolaan hutan lindung di Gunung Lolombulan dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT dan pemberian bobotnya dilakukan dengan melakukan perbandingan berpasangan pada metode AHP. Hasil dari analisis ini diharapkan menjawab pertanyaan dari tujuan penelitian ini yaitu mengidentifikasi peubah strategis unsur internal dan eksternal serta pengaruhnya terhadap perkembangan hutan lindung yang mendukung pengelolaan

adalah situasi atau kondisi peluang yang berasal dari luar organisasi, dan 4) threats (T) adalah situasi ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi dan dapat mengancam eksistensi organisasi pada masa depan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan lokasi penelitian di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara dan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) IV. Informan yang wawancara dalam penelitian ini adalah pimpinan dan staf di Dinas Kehutanan Sulawesi Utara. Proses analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif, analisis SWOT (*strength, weaknes, opportunity, threat*) dan analisis AHP (*analytical hierarchy process*). Tujuan pertama yakni merumuskan dan mengevaluasi peran Pemerintah dalam pengelolaan hutan lindung dan identifikasi peubah strategis unsur internal dan eksternal serta pengaruhnya terhadap perkembangan hutan lindung yang mendukung pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan di Hutan gunung lolombulan dijelaskan melalui analisis SWOT (*strength, weakness, opportunity dan threat*). Analisis ini pada dasarnya dilakukan melalui penelusuran dan pengungkapan isu-isu strategis disekitar pengelolaan hutan lindung untuk selanjutnya dipakai sebagai dasar dalam penyusunan strategi. Penentuan tingkatan prioritas dalam SWOT ini dilakukan dengan menggunakan AHP melalui wawancara pakar dan pengelolaan datanya.

sumberdaya hutan secara berkelanjutan di Gunung Lolombulan dijelaskan melalui analisis SWOT (*strength, weakness, opportunity, dan threat*).

Tabel 1. Internal Strategi

Faktor Internal	Jumlah	Bobot	Rating	Skor
KEKUATAN				
1. Legalitas formal KPHL Unit IV dan kawasan hutan	3	0,19	5	0,95
2. Pemanfaatan jumlah SDA maupun SDM yang berkualitas	3	0,19	4	0,76
3. Sarana dan Prasarana yang memadai	3	0,19	5	0,95
Jumlah	9	0,57		2,66
Kelemahan				
1. Belum tersedia sumber pembiayaan yang jelas	2,5	0,16	3	0,48
2. Belum tegas kewenangan antara pihak KPHL dengan lembaga instansi lain	2	0,13	4	0,52
3. Organisasi belum selevel SKPD, masih UPT dibawah Dinas Kehutanan	2	0,13	3	0,39
Jumlah	6,5	0,42		1,39
Total Keseluruhan	15,5	1,00		4,05

Tabel 2. Eksternal Strategi

Faktor Eksternal	Jumlah	Bobot	Rating	Skor
PELUANG				
1. Komitmen yang tinggi dari pemerintah pusat (Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan pengelolaan hutan berbasis KPH.	3	0,27	5	1,35
2. Adat budaya masyarakat yang dapat mendukung pengelolaan dalam kawasan KPH.	2	0,18	3	0,54
Jumlah	5	0,45		1,89
ANCAMAN				
1. Perambahan untuk membuka lahan perkebunan yang baru.	3	0,27	4	1,08

2. Lemahnya koordinasi antar instansi pemerintah dalam pengelolaan hutan.	3	0,27	2	0,54
Jumlah	6	0,54		1,62
Total Keseluruhan	11	1.00		3,51

Berdasarkan table 1 dan 2 di dapat bahwa jumlah skor dari Kekuatan (*strength*) sebesar 2,66 dan total skor Kelemahan (*Weakness*) adalah 1,39. Jadi total skor IFAS Faktor Internal sebesar 4.05 yang di dapatkan dari pengjumlahan skor Kekuatan dan total skor Kelemahan. Dan untuk total skor dari Peluang (*Opportunity*) sebesar 1,89 dan total skor Ancaman (*Threat*) sebesar 1,62. Total skor EFAS Faktor Eksternal adalah 3,51 Hasil pengjumlahan dari peluang dan ancaman.

Dari total IFAS dan EFAS akan terbentuk titik acuan Matriks kuadran SWOT untuk mengetahui posisi organisasi. Posisi Dinas Kehutanan Sulawesi Utara dapat digambarkan dalam bentuk diagram sebagai berikut

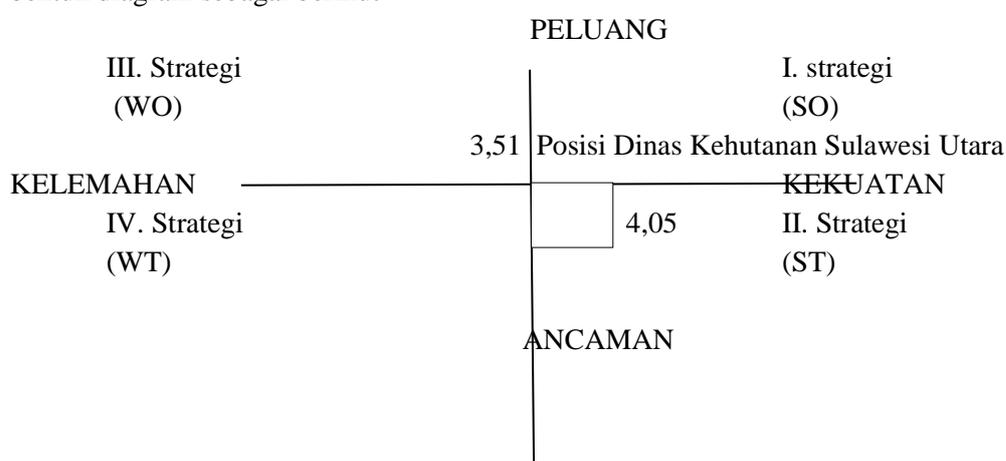


Diagram SWOT pada Gambar 1. menunjukkan bahwa posisi hutan lindung berada pada sel ketiga yang berarti bahwa sistem pengelolaan hutan lindung di Gunung Lolombulan ini mempunyai peluang yang sangat besar, tetapi di lain pihak menghadapi beberapa kendala/kelemahan internal. Menurut Rangkuti (2015), apabila posisi berada pada kuadran (sel) 3 maka sebaiknya diterapkan strategi WO (*Weaknes- Oportunity*), yaitu strategi meminimalkan masalah-masalah internal sehingga dapat merebut peluang yang lebih baik.

Posisi hutan lindung di Gunung Lolombulan berada pada sel 3 menunjukkan bahwa strategi yang harus di terapkan yaitu Strategi WO dan SO dengan cara 1). Mengelola kegiatan di KPHL yang bersifat strategis dengan meningkatkan kegiatan yang sudah berkembang dan menghasilkan penerimaan dalam waktu relative singkat; 2). Memperkuat kelembagaan KPHL menjadi SKPD mandiri; 3). Mengembangkan kegiatan yang didukung oleh pembiayaan dari Kementerian Kehutanan dan pemerintah pusat; 4). Memanfaatkan potensi investasi bidang kehutanan dalam pemanfaatan jasa lingkungan dan HHBK; 5). Mengembangkan kerjasama dengan masyarakat dalam mengelola lahan dan hasil hutan; 6). Memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada.

Metode yang digunakan dalam menganalisis prioritas strategi pengembangan hutan rakyat adalah metode analisis hierarki proses (AHP) meliputi aspek pendanaan, aspek pemberdayaan petani, aspek kemitraan petani dan investor serta aspek pemantapan kelembagaan hutan lindung. Menurut

Gane (2007) strategi manajemen yang diterapkan pada sector kehutanan meliputi sumberdaya, kegiatan,output, organisasi dan lembaga bersama-sama sebagai suatu sistem.

Penentuan prioritas strategi dalam dilihat dalam table berikut;

NO	RENCANA/STRATEGIS	ARAHAN PERENCANAAN
1	Inventarisasi Berkala Wilayah Kelola serta Penataan Hutannya	Inventarisasi hutan secara berkala dan menyeluruh akan dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi yang lengkap tentang progress kegiatan dan dampaknya terhadap neraca sumber daya alam di wilayah KPH IV Poigar
2	Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Tertentu	Mengacu pada fungsi hutan yang merupakan hutan lindung dan Hutan Produksi Terbatas berdasarkan PP N0.3 tahun 2008 dan PP No.6. Tahun 2012 Telah Disusun Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) yang difasilitasi oleh BPKH Wilayah VI, Kemudian disahkan pada tanggal 07 Februari 2014 oleh Menteri Kehutanan melalui Kepala Pusdalbanghut Regional IV melalui SK Menhut No. SK.265/Menhut-II/Reg.4-2/2014
3	Pemberdayaan Masyarakat	Pemberdayaan masyarakat diarahkan pada penentuan pilihan sumber-sumber penghidupan yang berkelanjutan, dengan memberikan peningkatan kapasitas dan kesempatan untuk mengembangkan diri berdasarkan potensi yang dimiliki, dengan memperhatikan lima modal kehidupan, yaitu: fisik, sosial, finansial, manusia dan modal alam
4	Penyelenggaraan Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam	Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam ditujukan pada pencegahan illegal logging, perambahan, pengendalian kebakaran hutan/lahan, dan over harvesting sumberdaya alam agar kelestarian keanekaragaman hayati tetap terjaga
5	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas SDM	Penyediaan dan peningkatan kapasitas SDM akan dilakukan kepada Sektor Publik, Sektor Swasta dan CSO baik untuk aspek akademis, teknis dan profesionalisme. Selanjutnya, penyediaan dan peningkatan SDM ini akan didukung dengan adanya kelembagaan yang memadai dalam pengelolaan kawasan KPH Unit IV tersebut

6	Penyediaan Pendanaan	Penyediaan pendanaan akan lebih difokuskan kepada bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat baik secara langsung ataupun tidak langsung, seperti fasilitasi berbagai perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
7	Peningkatan Sarana dan Prasarana	Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk optimalisasi pengelolaan di tingkat tapak dan pelayanan masyarakat
8	Pembinaan dan Pemantauan (Controlling) Pelaksanaan Rehabilitasi dan Reklamasi pada Areal yang Sudah Ada Ijin Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutannya	Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi pada areal yang sudah dan akan mendapatkan ijin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan akan dilakukan secara intensif dan ketat dengan membangun SOP yang memadai.
9	Pengembangan Investasi	Pengembangan investasi akan dilakukan dengan tetap mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem dan tetap memperhatikan tujuan utama atau fungsi hutan lindung

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dilakukan tentang Strategi Dinas Kehutanan Dalam Pengelolaan Hutan di Gunung Lolombulan Kabupaten Minahasa Selatan menunjukkan bahwa hasil analisis faktor internal menunjukkan kekuatan yang dimiliki Dinas Kehutanan Sulawesi Utara yaitu Legalitas formal KPH Unit IV Poigar dan kawasan hutan Pemanfaatan jumlah SDA maupun SDM yang berkualitas, Sarana dan Prasarana yang memadai. Hasil analisis faktor eksternal menunjukkan bahwa kelemahan yang terdapat dalam strategi Dinas Kehutanan Sulawesi Utara adalah belum tersedia sumber pembiayaan yang jelas, belum tegas kewenangan antara pihak KPH dengan lembaga instansi lain, Organisasi belum selevel SKPD, masih UPT dibawah Dinas Kehutanan Sulawesi Utara. Hasil analisis faktor eksternal yang memperlihatkan beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan

oleh Dinas Kehutanan Sulawesi Utara adalah Komitmen yang tinggi dari pemerintah pusat (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan pengelolaan hutan berbasis KPH, Adat budaya masyarakat yang dapat mendukung pengelolaan dalam kawasan KPH. Dan hasil analisis faktor eksternal dapat dilihat dari beberapa ancaman yaitu . Perambahan untuk membuka lahan perkebunan yang baru, lemahnya koordinasi antar instansi pemerintah dalam pengelolaan hutan. Berdasarkan analisis SWOT maka terdapat 9 strategi yang dapat digunakan dalam pengelolaan hutan lindung oleh Dinas Kehutan Sulawesi Utara. Dengan Strategi memakai Kekuatan untuk memanfaatkan Peluang (SO).

Oleh karenanya maka disarankan agar Dinas Kehutanan memperhatikan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan perlindungan hutan untuk polisi kehutanan terutama pada

daerah-daerah yang sulit dijangkau. Perlunya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat mengenai status kawasan Hutan Lindung sebagai hutan negara yang sampai saat ini masih diklaim oleh masyarakat sebagai lahan hak milik. Perlunya penyuluhan hukum terutama mengenai hukum kehutanan kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui peraturan yang mengatur perlindungan hutan dan tiindak pidana kehutanan. Perlunya tenaga penyuluh kehutanan maupun personil kehutanan dari pemerintah yang berbaur dengan masyarakat sehingga perlindungan hutan dapat berjalan lebih optimal dan bukan hanya sebagai formalitas. Terhadap para pelaku perambah hutan yang telah tertangkap tangan sebaiknya diproses sesuai hukum yang berlaku, dan sebaiknya hukum dapat lebih tegas dalam menjatuhkan hukuman agar dapat membuat pelaku jera.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Anwar. 2011. Komuikasi Politik: Paradigma. Teori-Aplikasi-strategi dan komunikasi Politik Indonesia. Jakarta PT. Balai Pustaka
- Assauri, S. 2011. Strategi Mnagement, Sustainable Competitive Advantages, Lembaga Management Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Arief, Arifin. 2001. Hutan dan Kehutanan. Yogyakarta: Kanisius
- Arifin, Bustanul. (2001). Pengelolaan Sumberdaya Alam Indonesia: Perspektif
- Adisasmita, Rahardjo. 2011. Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Ekawati, Sulistya. (2010). Tata Hubungan Kerja Antarinstitusi Kehutanan dalam Pengelolaan Hutan Lindung di Era Otonomi Daerah. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol. 7 No. 3, Desember: 211 – 225
- Faisal Afif, Strategi Menurut Para Ahli, (Bandung : Angkasa) 1984 – Hlm. 09
- Gane, M. 2007. Strategic Management and Sustainable Development For the Forest Sector. Springer. Netherlands
- Intan Silvia Dale (2012). Pengelolaan Hutan Rakyat komunitas Dusun Bogoran Wonosobo
- Moleong, J. 2007. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Rosda karya
- Muhamad ikhsan taufik (2018). Evaluasi Program Pengelolaan Hutan Mangrov
- Rangkuti F., 2015. Analisis SWOT; Teknik Membedah Kasus Bisnis. PT.Gramedia Jakarta.
- Rino Adwat (2014). Pengelolaan Hutan Konservasi Desa bagi Resistensi Masyarakat Desa Ladang Palembang Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong
- Salim. 2003. Dasar-Dasar Hukum Kehutanan. Jakarta: PT Sinar Grafika.
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung
- Term Of Refference (TOR) Penyusunan Buku Kronologis Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Utara. Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik 2009. Manado.
- Tommy M. Palalpa (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Hutan Di Sekitar Gunung Lolombulan.
- Wahyu Dicka Permata (2017). Strategi Dinas Kehutanan Perkebunan Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam

Mengkomunikasikan Gerakan
Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Mangrove,

Sumber Lain

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013
tentang Kehutanan.

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI
UTARA

NOMOR 52 TAHUN 2017

2008. Laporan Evaluasi Perkembangan
Pemantapan Kawasan Hutan

Provinsi Sulawesi Utara dan Maluku Utara.
Manado.